

Myanmar: Melindungi hak-hak perempuan migran dan orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI di pemukiman kumuh kawasan industri selama pelaksanaan kebijakan karantina wilayah dan kudeta militer

Selama pelaksanaan karantina wilayah (*lockdown*) yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, sebuah organisasi masyarakat sipil (OMS) kecil saling bekerja sama dengan OMS lainnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, dan kelompok pengacara. Tujuan mereka adalah untuk membela hak-hak dan memenuhi kebutuhan primer perempuan migran dan kaum LGBTQI yang bekerja di pemukiman kumuh yang tumbuh di sekitar pabrik tekstil di pusat bisnis Myanmar.

Saat ini di Myanmar, kudeta militer sedang dilawan oleh jutaan masyarakat dengan penuh keberanian, serta sebagian besar anggota OMS yang bekerja aktif untuk melindungi ruang sipil di bawah pemerintahan terpilih telah diasingkan, bersembunyi, atau ikut mengangkat senjata. Adanya hubungan dengan OMS dalam bentuk apa pun di masa ini berarti menempatkan diri dalam bahaya besar.

Karena alasan tersebut, nama asli OMS dan narasumber akan disamarkan. OMS tersebut akan disebut sebagai "**Basic Rights, Myanmar**" (BRM) dan narasumber akan disebut "**Aung.**"

Ikhtisar

Studi kasus ini berisi dua cerita:

1. **Karantina wilayah, unjuk rasa, dan iktikad:** Cerita tentang kebijakan karantina wilayah skala nasional dan lokal yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar untuk meredam laju penyebaran COVID-19 yang beririsan dengan ketiadaan perlindungan hukum, sistem, dan praktik yang memadai untuk warga yang paling rentan di Myanmar; dan kiprah OMS Myanmar (BRM) untuk terus menegakkan hak-hak perempuan dan hak-hak LGBTQI serta untuk mengatasi kesenjangan yang ada.
2. **Solidaritas, ancaman, dan harapan:** Cerita tentang tantangan dan bahaya yang dihadapi oleh para perempuan migran, orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI, dan OMS ini sejak militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada bulan Februari 2021, serta respons mereka.

1. Karantina wilayah, unjuk rasa, dan iktikad:

Apa konteksnya, dan apa saja kebutuhan yang ditangani?

Latar belakang sebelum terjadinya COVID-19:

Pemukiman kumuh dengan keterbatasan air bersih, sanitasi, perawatan kesehatan, atau pendidikan membentangi di pinggiran pusat bisnis Myanmar. Penghuninya biasanya adalah orang-orang yang melarikan diri dari konflik atau bencana alam di daerah lain Myanmar. Mereka mengambil peluang apa pun demi menghasilkan sedikit uang untuk memberi makan keluarga mereka. Industri garmen—yang berkembang pesat di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir—adalah salah satu pemberi kerja utama bagi para migran domestik ini.

Perempuan migran menempati posisi yang sangat riskan dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan baru memang mengakui dan membahas kekerasan berbasis gender yang banyak terjadi dalam masyarakat patriarki. Namun, dalam praktiknya, perempuan hanya mendapatkan sangat sedikit perlindungan nyata. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi. OMS telah bekerja keras untuk membawa perubahan, tetapi aktivis berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan baru pun tidak akan "memperbaiki" sikap dan keburukan yang sudah mendarah daging dalam sistem peradilan.

Secara teori, pekerja migran dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Myanmar. Namun, hak-hak mereka kerap dilanggar dalam praktiknya, meskipun serikat pekerja dan organisasi hak pekerja setempat telah lama mengupayakan peningkatan perlindungan mereka. Keterkaitan antara bisnis, militer, dan kroni militer—yang sebagian besar tetap tidak terjamah oleh hukum sekalipun berada di bawah pemerintahan demokratis—telah merumitkan perjuangan ini.

Orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBTQI menghadapi tingkat diskriminasi yang sangat tinggi, baik di mata hukum (yang menganggap tindakan sesama jenis sebagai ilegal) maupun dalam masyarakat Myanmar. Pelecehan, penolakan keluarga, kekerasan, dan kekerasan seksual merupakan hal yang biasa dialami oleh orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok masyarakat sipil muncul untuk mengatasi diskriminasi ini secara langsung, bahkan di kota-kota kecil.

Karantina wilayah COVID-19:

Karantina wilayah yang diberlakukan pada tingkat nasional dan daerah untuk menekan COVID-19 telah mengungkap dan memperparah masalah yang ada dalam masyarakat Myanmar. Ribuan orang terpaksa tinggal di pemukiman kumuh kawasan industri akibat kesenjangan dalam perlindungan ini. Saat pabrik memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya, yang pertama terkena PHK adalah para perempuan. Banyak tenaga kerja pabrik garmen yang didominasi oleh migran perempuan tiba-tiba mendapati diri mereka tanpa pekerjaan, tanpa cuti berbayar, tanpa pesangon setelah terkena PHK, dan tanpa kejelasan tentang tempat dan cara mereka untuk bisa kembali bekerja.

Perempuan dan orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI juga mendapati diri mereka dan anak-anak mereka harus mematuhi kebijakan karantina wilayah untuk terus tinggal di rumah bersama pasangan atau anggota keluarga yang berperilaku kasar. BRM melaporkan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga di pemukiman kumuh naik dua kali lipat. Ada juga percobaan pemerkosaan yang terjadi di pusat karantina yang dikelola pemerintah, tempat orang yang positif COVID-19 wajib tinggal.

Bagaimana tindakan mereka membantu melindungi ruang sipil

BRM bekerja sama dengan sebuah jaringan OMS, LSM lokal, dan kelompok pengacara untuk melindungi dan memperluas ruang sipil untuk hak-hak perempuan migran dan kaum LGBTQI di pemukiman kumuh. Mereka sudah melakukan pekerjaan ini selama 10 tahun saat pandemi dimulai, dan keadaan tiba-tiba menjadi makin mendesak dibandingkan sebelumnya.

Antara bulan Maret 2020 dan tanggal 31 Januari 2021, yaitu selama dua gelombang pertama COVID-19 di Myanmar, mereka telah:

- Mengadakan pembagian makanan dan uang tunai kepada keluarga yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan primernya karena tidak bisa bekerja atau kehilangan pekerjaan akibat karantina wilayah.
- Bernegosiasi dengan manajer pabrik secara langsung dan bekerja sama dengan serikat pekerja untuk menyelenggarakan unjuk rasa di luar pabrik untuk menuntut perlindungan terhadap pekerjaan bagi para perempuan dan pengangkatan kembali perempuan yang di-PHK.
- Bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat luas dengan cara menyebarkan pamflet informasi dan menyiarkan pesan dan pertunjukan singkat, melalui radio dan Facebook, yang menyoroti aspek pelanggaran hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga.
- Berupaya untuk mendidik perempuan tentang hak-hak mereka dengan kunjungan rumah untuk menemui keluarga dan mengadakan sesi peningkatan kesadaran dengan perempuan dalam kelompok kecil. Sesi ini secara khusus ditujukan untuk perempuan yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, untuk membantu mereka memahami apa saja pilihan yang terbuka bagi mereka.
- Bekerja untuk mengubah perilaku laki-laki dengan cara mempertemukan laki-laki yang diketahui berperilaku kasar pada anggota keluarganya, dengan tujuan untuk mengkaji dan menjelaskan hak-hak istri serta anak dan keponakan perempuan mereka.
- Menyediakan saluran siaga untuk dukungan, yang diiklankan secara luas melalui radio dan platform daring yang paling banyak digunakan (Facebook):

"Selama masa pandemi ini, semua orang dipaksa untuk tinggal di rumah, dan kita tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga meningkat pesat. Kami ingin memberi tahu Anda bahwa tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum, dan kami adalah pengacara yang dapat membantu Anda secara cuma-cuma. Anda dipersilakan untuk menghubungi kami di nomor ini..."

- Memberikan sesi konseling daring dan sesi dukungan psikososial kepada para perempuan, dengan tujuan untuk menciptakan ruang aman, tempat mereka dapat merasakan kelegaan dan kedamaian.
- Merespons tuduhan pemerkosaan di pusat karantina COVID-19 dengan cara mendidik pemimpin dan sukarelawan pusat karantina tentang risiko kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, serta mendukung mereka menciptakan sistem untuk memastikan perlindungan hak-hak orang yang tinggal di pusat karantina.
- Mendukung orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI yang mencari nafkah sebagai pekerja seks di jalanan kota besar melalui dukungan telepon, uang tunai, dan makanan.

Dampak kegiatan

BRM tahu bahwa banyak keluarga hidup lebih bahagia dan perempuan menjadi lebih aman setelah intervensi mereka. Panggilan dan kunjungan lanjutan menunjukkan perubahan hubungan dan sikap dalam rumah tangga, dan perempuan melaporkan bahwa mereka merasa lebih aman.

Negosiasi dengan manajer pabrik dan demonstrasi di luar pabrik berhasil membuat beberapa perempuan kembali dipekerjakan.

Tidak ada lagi laporan kasus percobaan pemerkosaan di pusat karantina yang dikelola oleh pemerintah setelah pekerjaan pendidikan dan peningkatan kesadaran yang dilaksanakan oleh koalisi ini.

Meskipun demikian, dampak intervensi ini sulit untuk dilaporkan secara rinci karena kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual adalah sesuatu yang masih tabu di Myanmar. Warga Myanmar sangat enggan untuk membicarakannya. Dampaknya terhadap pekerja seks LGBTQI, terutama, sangat sulit untuk dievaluasi karena komunikasi mereka yang tidak kontinu dengan organisasi.

Pekerjaan ini dilakukan dengan fokus pada respons, solidaritas, dan tindakan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan primer ribuan orang—bukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi strategis. Koalisi kerja antara OMS dan LSM, serikat pekerja, dan pengacara pro-bono skala lokal dan nasional memungkinkan jangkauan yang lebih luas kepada BRM. Namun, hal ini juga memunculkan permasalahan dalam hal pencatatan, pemantauan, dan evaluasi dampak.

2. Solidaritas, ancaman, dan harapan semenjak kudeta militer 1 Februari 2021

Nyali dan iktikad migran perempuan dan orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI

Sejak kudeta 1 Februari 2021—militer Myanmar mengambil alih kekuasaan secara paksa serta mengusir dan memenjarakan anggota parlemen terpilih—situasi perempuan migran dan orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI di pemukiman kumuh menjadi makin berbahaya dan riskan.

COVID-19, ketidakstabilan yang tercipta dari kudeta, dan reaksi internasional terhadapnya (termasuk sanksi dan penarikan bisnis asing) telah mengakibatkan penutupan makin banyak pabrik. Ribuan migran telah kehilangan pekerjaan mereka, tanpa bantuan dari serikat pekerja atau bantuan hukum saat mereka terkena PHK, tanpa pesangon, atau tanpa prosedur yang sesuai.

Junta militer juga tidak berbuat banyak untuk mengawasi pabrik dalam penerapan aturan untuk menekan penyebaran COVID-19, dan pemilik pabrik memanfaatkan kurangnya pengawasan ini. Pekerja pabrik yang terjangkit COVID-19 dipulangkan dan tidak dibayar selama masa karantina wajib. Mengetahui hal tersebut, beberapa pekerja memilih untuk terus bekerja meskipun ada kecurigaan bahwa mereka terinfeksi. Sebab, mereka adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga mereka. Pabrik terus beroperasi meskipun pekerja mereka dinyatakan positif. Akibatnya, virus menyebar cepat di antara komunitas yang rentan ini. Karena serikat pekerja dan organisasi penuntut hak menempatkan diri di garis depan gerakan pembangkangan sipil (GPS), mereka sekarang bersembunyi, dan pemilik pabrik

dapat bertindak semaunya tanpa risiko mereka akan ditentang atau dimintai pertanggungjawaban.

Dampak lain dari PHK besar-besaran dalam populasi yang rentan adalah bertambahnya pekerja seks, baik perempuan muda maupun kaum LGBTQI. Narasumber kami, Aung, bercerita bahwa dahulu "muncikari" harus membujuk atau memaksa orang untuk bekerja untuk mereka. Namun, saat ini, justru oranglah yang menghubungi mereka secara langsung untuk mencoba mencari pekerjaan sebagai pekerja seks. Jalanan di Yangon menjadi lahan baru yang dijejali oleh orang yang berusaha mencari pendapatan dari pekerjaan seks.

Perempuan dan kaum LGBTQI berada di garis depan GPS nirkekerasan besar-besaran yang berkembang pesat di seluruh Myanmar sebagai penolakan atas kudeta militer. Mereka menjadi pemimpin dan organisator yang penting dalam GPS. Saat mereka menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, mereka sekaligus melakukan aksi nirkekerasan yang kreatif untuk menantang norma masyarakat secara berani. Mereka menarik perhatian publik pada hak-hak perempuan dan hak-hak LGBTQI. (Misalnya, mereka mengeksploitasi gagasan tradisional yang mengatakan bahwa pakaian wanita "kotor" dan "melemahkan" bagi laki-laki dengan cara membuat penghalang dari rok bekas untuk memperlambat polisi dan tentara. Hal ini memperlambat pergerakan mereka ke pemukiman dan memberikan kesempatan kepada pengunjuk rasa untuk melarikan diri).

Orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI tampil mencolok dalam GPS (pakaian warna-warni dan bendera pelangi kerap hadir dalam unjuk rasa awal), sehingga banyak yang akhirnya dipenjara. Mereka sudah menderita dan terus menderita banyak pelecehan seksual dalam penjara. BRM berbagi cerita tentang penyiksaan seksual dan pemerkosaan terhadap orang yang mendefinisikan dirinya sebagai LGBTQI yang didalangi polisi dan tentara. Sering kali, perbuatan ini mendatangkan penyakit fisik dan mental yang serius.

BRM juga mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat di pemukiman kumuh. Dalam situasi sekarang ini, perempuan tidak memiliki perlindungan, begitu pun dengan dukungan dari pemerintah, OMS, atau LSM.

Situasi makin parah karena gelombang ketiga COVID-19 skala besar yang melanda Myanmar sejak bulan Mei 2021. Bencana kesehatan masyarakat besar-besaran ini makin memperparah krisis politik, sosial, dan ekonomi yang sedang berlangsung. Myanmar secara resmi mencatat 491.584 kasus COVID-19 hingga saat ini, dengan 18.465 angka kematian. Saat gelombang ketiga dimulai, sistem kesehatan sedang berantakan. Dokter dan perawat yang menginisiasi GPS ditahan, meninggal, atau bersembunyi. Warga tidak diizinkan untuk mengelola sistem sukarelawan dan gotong royong seperti yang mereka lakukan di bawah pemerintahan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Lembaga pemberi bantuan tidak diizinkan untuk menyalurkan bantuannya. Rumah sakit tidak menerima pasien COVID-19. Pusat karantina tidak tersedia. Pihak militer menghancurkan pabrik yang memproduksi oksigen dan menembaki orang-orang yang mengantre di jalan untuk membeli oksigen.

Respons terhadap kudeta militer

Gerakan Pembangkangan Sipil (GPS) nirkekerasan lahir segera setelah terjadi kudeta. Ini adalah contoh aksi yang mengesankan di Myanmar, yang terbentuk guna

melindungi ruang sipil. Ratusan ribu orang berkumpul dalam unjuk rasa di seluruh Myanmar. Kelompok etnis dan agama yang sebelumnya terpecah kini bersatu untuk berunjuk rasa. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, heteroseksual dan LGBTQI—semuanya membuat spanduk dan pakaian warna-warni; bersorak, bernyanyi, dan menari; memblokir jalan dan kedutaan; serta mengendarai konvoi mobil, sepeda motor, dan becak. Mereka menciptakan karya seni di jalanan dan secara daring; melukis seluruh jalan dengan pesan kepada komunitas internasional; serta mengelola sistem mengesankan agar semua orang bisa makan, minum, dan merasa damai. Ini adalah momen yang memperlihatkan harapan, daya, dan solidaritas yang sangat besar.

Namun, tanggapan militer terhadap GPS sangatlah brutal (1.178 orang dibunuh dan 9.014 orang ditangkap) hingga banyak organisasi internasional menyatakannya sebagai kejahatan terhadap umat manusia dan menyerukan adanya intervensi.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG, pemerintah bayangan terpilih), telah menggunakan platform daring untuk mengeluarkan pernyataan dan menyerukan revolusi bersenjata oleh warga sipil melawan pemerintah militer di seluruh negeri. Sudah ada pergerakan dari beberapa orang di GPS untuk ikut berperang melawan militer. termasuk bergabung dengan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), sebuah gerakan bersenjata nasional resmi yang dibentuk oleh "pemerintah bayangan" (NUG) terpilih dengan tujuan untuk menggulingkan junta militer. Pergerakan ini juga termasuk bergabung dengan pertahanan sipil lokal atau pasukan perlawanan bersenjata untuk melindungi diri dan bertempur melawan militer di sekitar rumah atau negara bagian mereka.

Masyarakat lain juga bergabung dengan kelompok etnis bersenjata, termasuk Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) dan Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA). Pemuda yang aktif berpolitik dari kota ramai-ramai bergabung dengan kelompok-kelompok ini. Mereka menerima latihan tempur dan mengorbankan kehidupan kota, koneksi internet 5G, dan gaya hidup kosmopolitan untuk bertolak ke hutan dan rimba di daerah perbatasan. Komunitas pekerja migran juga turut melawan tindakan keras militer dengan senjata rakitan. Sudah banyak nyawa yang terenggut.

Serangan dilancarkan ke gedung-gedung negara, dan bahkan ke orang-orang yang dianggap punya kaitan dengan pemerintah militer. Menurut NUG, antara tanggal 7 Oktober dan tanggal 6 November, tercatat total 668 insiden yang menargetkan pasukan junta militer dan rekan-rekannya, termasuk 83 serangan dari kelompok etnis bersenjata dan 207 dari pasukan perlawanan sipil, yang menewaskan 1.300 tentara militer.

Kekerasan mematikan yang diterapkan oleh junta terhadap penduduknya, yang dibagikan secara luas di media sosial, mengakibatkan pembelotan oleh beberapa personel militer dan polisi yang kerap membawa senjata mereka juga untuk bergabung dengan gerakan perlawanan. Salah satu tentara tersebut mengaku, "*Hati saya hancur menyaksikan perbuatan militer yang memukuli, menyiksa, dan membunuh anak muda—orang yang seharusnya [kita] lindungi.*"

Aksi nirkekerasan untuk melindungi ruang sipil

Walaupun terjadi kudeta, krisis kemanusiaan sebagai buntut dari kudeta, dan tindakan keras terhadap masyarakat sipil dan pengunjung rasa; respons masyarakat benar-benar berani dan konsisten.

Unjuk rasa nirkekerasan terwujud dalam beberapa bentuk:

Boikot: GPS nirkekerasan umumnya dilanjutkan dengan perlawanan yang senyap tetapi efektif terhadap kepemimpinan militer, dalam bentuk boikot terhadap junta militer. GPS ini meliputi pegawai negeri sipil yang menolak bekerja, warga yang menolak untuk membayar tagihan listrik, pelajar yang tidak bersekolah di sekolah negeri, dan orang-orang yang tidak menerima vaksin COVID-19 yang mereka salurkan. Orang-orang juga memboikot perusahaan, termasuk perusahaan telekomunikasi besar dan merek makanan terkenal (misalnya bir Kirin).

Menyoroti dan mempermalukan kalangan elite: Kampanye daring yang terorganisasi dan efektif menyebutkan nama dan menyoroti individu dan keluarga yang mendapat keuntungan dari hubungan mereka dengan militer, dalam hal kekayaan dan/atau peluang. Kampanye ini menggunakan informasi dan foto dari platform media sosial untuk menyelidiki, mempermalukan, dan menyerang kalangan elite ini dalam skala nasional. Mereka dituntut untuk secara tegas menarik dukungan mereka dari militer dan bergabung dengan GPS.

Unjuk rasa publik di jalanan: Hebatnya, kendati ada ancaman yang sangat nyata untuk menerima pembalasan menggunakan kekerasan, kelompok-kelompok kecil terus melakukan unjuk rasa publik di kota-kota Myanmar ([misalnya, unjuk rasa baru-baru ini di Mandalay](#)). [Pembalasan terhadap pengunjung rasa yang merupakan kaum LGBTQI, etnis minoritas, anggota organisasi kemahasiswaan, pendukung partai Liga Nasional untuk Demokrasi \(NLD\), dan penganut non-Buddha dilaporkan lebih keras dibandingkan terhadap pengunjung rasa lainnya.](#)

Unjuk rasa publik secara daring: Pernyataan protes, informasi tentang situasi, serta gagasan dan dorongan untuk melanjutkan perlawanan nirkekerasan juga dibagikan secara luas oleh individu dan kelompok melalui media sosial (misalnya unggahan oleh penata rias LGBTQI terkenal yang memiliki lebih 790.000 pengikut dan sedang dalam persembunyian).

Advokasi kepada komunitas internasional: Kelompok masyarakat sipil dan NUG menggunakan platform daring untuk mengadvokasi perhatian dan tindakan internasional kepada negara dan organisasi di Asia (misalnya, kepada ASEAN), dan dunia (kepada PBB dan bisnis asing yang berinvestasi di Myanmar, terutama yang berhubungan dengan militer, [misalnya Total](#)). Media massa dan jurnalis Myanmar terus mengungkap cerita mereka tanpa takut, meskipun hukuman penjara dan penyiksaan sudah menanti jika mereka ditangkap oleh militer.

Kegiatan masyarakat sipil untuk mendukung penduduk setempat

Karena peran besarnya dalam gerakan GPS, hubungan dengan PDF, serta riwayat dan tujuan untuk melindungi hak-hak penduduk yang rentan, sekarang ini sangat

berbahaya untuk terlibat secara terang-terangan dalam kegiatan masyarakat sipil, terutama kegiatan terkait perlindungan hak-hak sipil. Militer terus melakukan penangkapan di malam hari dan menahan orang tanpa dakwaan. Mereka menyiksa, memerkosa, dan membunuh korban, tanpa terjerat hukum. Untuk organisasi kecil seperti BRM, ruang sipil untuk beroperasi dengan aman hanya tinggal kenangan. Masa "sebelum kudeta" dikenang oleh banyak orang di Myanmar sebagai masa yang penuh dengan kemungkinan dan kebebasan.

OMS yang terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan selama gelombang ketiga COVID-19 telah dipecat dan/atau ditangkap. Beberapa kelompok merespons ancaman ini dengan kreatif. Misalnya, usaha dan kelompok di Yangon yang mengadakan penjualan sembako dengan harga rendah bagi orang yang membutuhkan, merespons ancaman penangkapan dengan cara meninggalkan kios mereka dan langsung mendatangi rumah pembeli.

Organisasi lain merasa tidak bisa beroperasi karena ancamannya terlalu besar. Narasumber kami dari BRM mengatakan, dalam konteks ancaman ini, BRM tidak sanggup lagi menjalankan kegiatannya untuk mendukung migran perempuan dan kaum LGBTQI di pemukiman kumuh. Mereka tidak dapat membagikan uang tunai atau makanan, memberikan konseling, mengadakan sesi pembangunan kesadaran, atau melakukan kampanye media. Bagi mereka, semua itu terlalu berbahaya. Keterpaksaan untuk meniadakan tindakan ini meremukkan individu dan komunitas yang mengetahui seberapa besar kebutuhan itu. Mereka kecewa bahwa mereka mengetahui cara mengadakan respons yang efektif, tetapi mereka tidak bisa melakukannya akibat ancaman pembalasan.

Apa pun yang BRM lakukan, semuanya dilakukan semaksimal mungkin dari 'bawah tanah'. Misalnya, BRM berusaha untuk mendukung pekerja seks, yang sekarang memenuhi banyak jalanan di Yangon, dengan cara memberi bantuan uang tunai dan makanan serta sesekali memeriksa keselamatan mereka. Kegiatan ini sangat terbatas dan dilakukan dengan sangat hati-hati, demi keselamatan pekerja seks dan anggota OMS.

Sayangnya, masa depan OMS di Myanmar tampak sangat suram. Narasumber kami Aung, tidak tahu apa yang akan terjadi pada BRM. Dia merasa sulit atau mustahil untuk membayangkan masa depan. Situasi saat ini menyedot semua perhatian mereka.

Apa pelajaran yang dapat diambil dari pendekatan di atas untuk melindungi ruang sipil selama pandemi COVID-19 di Myanmar, sebelum dan setelah kudeta militer?

Studi kasus kegiatan OMS di Myanmar ini menunjukkan kekuatan organisasi masyarakat sipil kecil untuk melindungi ruang sipil saat mereka bersatu dengan kelompok lainnya untuk kepentingan yang sama, dalam contoh ini, yaitu serikat pekerja, OMS lainnya, dan pakar hukum.

Studi ini menunjukkan pentingnya menggunakan berbagai pendekatan untuk mewujudkan perubahan. Kelompok ini menggabungkan unjuk rasa publik dengan lokakarya perubahan sikap mendalam skala kecil; kampanye informasi secara

daring dan di jalanan dengan menggunakan berbagai media; serta bantuan uang tunai, makanan, dan layanan psikologis langsung kepada orang yang sangat membutuhkan.

Studi ini menunjukkan bahwa gagasan Barat tentang cara membuat perubahan mungkin tidak dapat berlaku di semua tempat. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa, dalam situasi ini, peran pengacara adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan kaum LGBTQI dengan cara membawa kasus ke pengadilan. Namun sebaliknya, mereka memilih untuk mendatangkan perubahan melalui proses peningkatan kesadaran yang relatif diam-diam, tidak mencolok, dan informal, serta melalui pemanfaatan pengaruh. Hubungan, rasa saling hormat, dan pengertian mungkin lebih penting dan efektif dalam situasi ini untuk melindungi hak-hak orang yang berada di pusat karantina, alih-alih menegakkan prinsip dan hukum hak asasi manusia internasional (konsep yang tidak dikenal oleh hampir semua penduduk Myanmar).

Studi ini juga menunjukkan bagaimana hubungan, sistem, dan pelajaran yang didapatkan oleh OMS dalam satu konteks dapat digunakan untuk merespons tantangan lainnya. Keterampilan dan pengetahuan orang-orang di BRM yang telah bekerja untuk melindungi ruang sipil selama bertahun-tahun memungkinkan mereka untuk memberikan respons yang cepat dan efektif guna mendukung dan melindungi perempuan migran dan kaum LGBTQI di pemukiman kumuh saat COVID-19 pertama kali melanda Myanmar dan pelaksanaan karantina wilayah. Pengetahuan ini, dan sistem yang berlaku, sangat membantu mereka berpartisipasi untuk mengadakan unjuk rasa massal nirkekerasan melawan kudeta militer.

Dapat dinyatakan pula bahwa hubungan dan koneksi memainkan peran penting dalam mobilisasi energi sipil yang efektif di Myanmar selama krisis karena COVID-19 dan kudeta, dan bahwa koneksi ini justru diperkuat oleh adanya krisis tersebut. Kolaborasi telah tumbuh antara OMS, LSM, dan LSM internasional. Sumbangan individu dan bersama berupa uang, barang, dan waktu telah disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di komunitas lokal dan di beberapa bagian negara yang sangat terdampak. Unjuk rasa massal yang diikuti ratusan ribu orang berlangsung saat suhu mencapai 39 derajat Celsius. Semua tindakan ini memerlukan dan memperkuat komunikasi, kepercayaan, dan hubungan antara OMS dan individu.

Bahkan saat di bawah pemerintahan demokratis, perpecahan tetap terasa kental antara warga Myanmar dengan identitas etnis dan agama yang berbeda (diperparah oleh propaganda dan aksi militer yang memang sengaja melakukannya). Meskipun perpecahan ini tetap ada, ancaman bersama yang timbul dari pandemi serta respons bersama yang masif dan efektif oleh masyarakat sipil telah mendorong rasa "kekitaan" di seluruh Myanmar yang beragam, dihidupkan kembali, dan diliputi dengan kebanggaan atas semua yang berhasil diwujudkan. "Kekitaan" ini makin diperkuat oleh pengalaman bersama tentang kegusaran dan penolakan yang berapi-api setelah kudeta; melalui unjuk rasa bersama, pengambilan risiko, dan mobilisasi kreatif melawan militer.

Dari mana asal keteguhan dan nyali warga Myanmar yang terlibat dalam tindakan ini?

“Saya harus bertindak; Saya tidak ingin kembali ke zaman kegelapan, kembali ke masa sebelum demokrasi yang membuat kami tidak terhubung dengan dunia luar” adalah pernyataan yang sering dilontarkan oleh warga Myanmar yang terlibat dalam perlawanan.

Motivasi dan keteguhan berasal dari berbagai sumber: iman dan efek doa yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi beberapa orang; keyakinan akan hak asasi manusia dan demokrasi bagi yang lainnya; kerinduan akan kemajuan dan modernitas, akan kebebasan untuk membangun Myanmar yang baru bagi orang yang lain lagi. Kemarahan besar dan penolakan untuk bertekuk lutut adalah faktor pendorong bagi sebagian orang. Kepedulian terhadap sesama warga negara terus mendorong aksi solidaritas dan sikap saling peduli dalam berbagai wujud dan bentuk.

Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya di Myanmar. Namun, sejarah Myanmar mencatat bahwa meski dihadapkan pada tindakan kasar dan kekerasan, perlawanan oleh masyarakat sipil tidak akan hilang. Mungkin, perlawanan ini perlahan tidak terlalu terdengar atau kelihatan, tetapi tidak akan berakhir, walau ada berbagai kekuatan yang digunakan untuk melawannya.

Sikap saling mendukung telah dalam berakar dalam budaya dan masyarakat Myanmar. Ini bukanlah krisis pertama yang dialami oleh warga Myanmar. Masyarakat sipil Myanmar terus melakukan segala upaya yang mereka bisa untuk melindungi ruang sipil. Mereka membutuhkan dukungan—moral dan praktis—dari masyarakat sipil internasional agar mereka dapat melanjutkan perjuangan yang mungkin akan berlangsung lama menuju kemerdekaan.